

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Proses pemilihan kepala desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, menyebabkan adanya konflik atau permusuhan pada pemilihan kepala desa baik itu antara kedua calon kepala desa maupun antara masing-masing pendukung calon kepala desa. Dalam diri tidak di terapkan prinsip untuk selalu berlapang dada akan hasil yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan mediasi kepada masyarakat di Desa Mekar Jaya yang sedang berkonflik akibat dari pemilihan kepala desa merupakan suatu proses yang paling produktif untuk dapat mempersatukan kembali masyarakat yang putus hubungan keluarganya agar silaturahmi dapat terjalin kembali. Safety value atau katup penyelamat merupakan mekanisme khusus yang digunakan untuk mencegah konflik sosial yang berpotensi merusak struktur keseluruhan, seperti dengan cara membiarkan salah satu pihak mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik, mendorong kedua pihak untuk selalu memaafkan dan menyediakan sebuah solusi yang dapat dipilih kedua pihak di mana cara ini mungkin dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Suatu permasalahan atau permusuhan pasti ada penyelesaiannya di mana adanya pihak orang ketiga yang dapat mendamaikannya kembali masyarakat di Desa Mekar Jaya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Peristiwa ataupun konflik yang terjadi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo telah memberikan pelajaran berharga untuk kita semua, khususnya bagi pemerintah desa serta masyarakat setempat dalam melihat suatu konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa.

Pemerintah desa setempat diharapkan selalu melakukan pengawasan yang lebih serius dan ketat terhadap konflik agar tidak terjadi berbagai masalah yang dapat merugikan semua pihak karena disini seharusnya pemerintah desa memiliki peranan penting dalam sebuah lembaga kemasyarakatan, mengkoordinir masyarakatnya agar tidak terjadi berbagai macam permasalahan yang dapat merugikan orang banyak serta dalam pemilihan selanjutnya harus ada sosialisasi yang mendalam tentang pemilihan agar tidak ada yang melakukan money politik serta tidak ada lagi masyarakat yang menerima suap dalam bentuk apapun guna untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu suatu masalah.

Melihat konflik yang sering terjadi berada di masyarakat maka pemerintah Pusat sekali lagi diharapkan dapat mengambil keputusan yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kebijakan dan kebijakan dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna meredam konflik agar masyarakat Desa Mekar Jaya tidak terkesan tidak sejalan, tentunya semua pihak pasti menginginkan perdamaian yang menguntungkan bagi semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Josef Mario Monteiro, S.H. , M.H., 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.*
- Maleong.(2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.* PT Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang.*
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pernandamedia Group, 2010).
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*,(Bandung: Refika Aditama,2009)
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni,2016.*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Suhartono, 2001, *Politik Loca, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera: Yogyakarta.*
- Paul Johnson, Doyle, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta
- Poerwadarminta, 1976,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES (235.68 KB)
- PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (319.5 KB)

([https://www.academia.edu/7440214/ANALISIS\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF\\_MOD](https://www.academia.edu/7440214/ANALISIS_PENELITIAN_KUALITATIF_MOD)

EL MILES dan HUBERMAN)

<https://www.researchgate.net/publication/326610706>

Natalia S. Nadiak, “*Konflik Antara Petani Keramba dengan Pt. Aquafam Nusantara (Studi Kasus: Pada Petani Keramba dengan Pt. Aquafam di Ajibata, Kabupaten Tobasa)*”, Skripsi Pada Program Sarjana Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Sumatera Utara, 2010.

Irwan Akbar, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Soppeng*”. Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

Arnianah, “*Konflik Masyarakat Desa Tonrong Tenggara Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017*”. Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Suwardi. (2015). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2014: Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*. Diss. Uin sunan ampel Surabaya. digibli.uinsby .

Zerunisa, R., & Winarni, F. (2017). *Political Marketing Kandidat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (Studi Kasus Desa Getan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten)*. Jurnal Student , 100-104.

Ahmad Taufik, Hamrun. *“Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng”*. Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Marno Wance, *“Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara”*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Iwan Nuryanto, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkadaes Tahun 2013”* (Penelitian Di Desa Batur Sari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak). Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Lalu Reza Fahlevi, *“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018”*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2019